

BAB III

PINJAMAN DANA ASING UNTUK PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Akselerasi pembangunan manusia diperkirakan bisa dipercepat jika didukung oleh anggaran yang memadai untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Diperkirakan, semakin besar porsi anggaran yang dikucurkan, semakin cepat akselerasi pembangunan manusianya. Namun, celakanya porsi anggaran yang dikucurkan terbilang minim dan penggunaannya belum optimal.

Islamic Development Bank

Islamic Development Bank atau biasa disingkat dengan IDB adalah lembaga keuangan internasional yang berdiri pada tahun 1975 (1395 H) berdasarkan pada Anggaran Perjanjian hasil Deklarasi of Intent saat Konferensi Menteri Keuangan Negara-negara Muslim yang berlangsung di Jeddah pada 1973 (1393 H). IDB secara resmi mulai beroperasi pada 15 Syawal 1395H (20 Oktober 1975 Tujuan utama pembentukan IDB adalah untuk memberi bantuan untuk pembangunan ekonomi dan sosial dari Negara-negara anggota dan komunitas muslim dari Negara non anggota dengan berdasarkan pada prinsip syariah.

Pada 1440 H tahun, Bank Pembangunan Islam mempunyai visi akan menjadi bank pembangunan kelas dunia, terinspirasi oleh prinsip-prinsip Islam, yang telah membantu secara signifikan mengubah lanskap pembangunan manusia yang komprehensif di dunia Muslim dan membantu memulihkan martabat.

Bank ini mempunyai misi untuk mempromosikan pembangunan manusia yang komprehensif, dengan fokus pada bidang prioritas pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, mempromosikan pendidikan, meningkatkan tata kelola dan mensejahterakan rakyat.

Keanggotaan IDB berdiri di 57 negara yang mencakup banyak daerah. Kondisi dasar untuk keanggotaan adalah bahwa calon negara harus menjadi anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), membayar angsuran pertama dari langganan minimum kepada Bursa Ibukota IDB, dan menerima syarat dan ketentuan yang mungkin diputuskan atas oleh Dewan Gubernur.

Modal IDB berasal dari iuran yang dibayarkan oleh negara-negara anggotanya. modal dasar telah meningkat dari ID2 miliar di 1395H (1975) untuk ID100 miliar di 1435H (2014) sementara modal yang ditempatkan berdiri di ID50 miliar dengan 98,6 persen dari jumlah ini berlangganan oleh negara-negara anggota pada akhir dari 1435H. (Lihat lampiran hal.121)

Berkantor pusat di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, IDB memiliki empat kantor regional di Rabat, Maroko; Kuala Lumpur, Malaysia; Almaty, Kazakhstan; dan di Dakar, Senegal, dan Kantor Gateway Negara di Turki (Ankara dan Istanbul) dan Indonesia. Tahun baku IDB adalah tahun Hijriyah (H). Perhitungan dari IDB adalah Dinar Islam (ID) yang setara dengan satu *Special Drawing Right* (SDR) dari Dana Moneter Internasional.

IDB memiliki prinsip pengelolaan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain, IDB mengaplikasikan seperangkat aturan yang berasal

dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW serta pendapat ilmiah (ijtihad) yang juga didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam mengatur perbankan islam, IDB memiliki prinsip pelarangan bunga (riba) dalam seluruh transaksi keuangan, partisipasi dalam pembagian untung-rugi, biaya pinjaman hanya dikenakan terhadap dana yang telah ditarik/digunakan, tidak terdapat *front-end fee* dan *commitment fee*, dan terdapat rabat (*discount*) jika membayar tepat waktu.

Dibandingkan dengan pinjaman dari lembaga keuangan internasional lainnya, pinjaman IDB juga dapat dibilang menguntungkan. Perbandingan pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan internasional dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.1. Perbandingan Pinjaman Multilateral

No	Nama Lembaga	Biaya Administrasi (Year)	Front – End Fee	Comitment Fee	Interest Rate (Year)	Durasi	Grace
1	IDB	2,0 %	-	-	-	20 th	5 th
2	ADB	-	1 %	0,75 %	LIBOR + 0,60 %	25 th	5 th
3	IFAD	0,75 %	-	-	0 %	40 th	10 th
4	IBRD	-	1 %	0,75 %	LIBOR + 0,75 %	20-25 th	5 th
5	IDA	0,75 %	0,5 – 0,75 %	0,5 %	0,35 %	35 th	10 th

Dikutip dari berbagai sumber

** *front-end fee* (biaya pinjaman selama masa berlaku pinjaman), *Interest Rate* (bunga pinjaman), *commitment fee* (biaya sisa target pinjaman yang belum digunakan), *Administration fee* (biaya administrasi), *Service Charge* (biaya administrasi setiap penarikan pinjaman), sedangkan LIBOR adalah Bunga dihitung dari kurs referensi *London Interbank Offered Rate*.

IDB adalah lembaga yang dibentuk oleh umat, untuk umat dan dioperasikan dan dikelola oleh umat. IDB membiayai perdagangan dan pembangunan proyek-proyek baik untuk sektor publik dan swasta, membiayai proyek-proyek berukuran besar dan menengah dan usaha kecil di negara-negara anggota.

Selain, IDB memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dana negara-negara Islam untuk pembangunan dan secara aktif memberi jaminan bebas bunga berdasarkan partisipasi modal negara anggotanya. Keberadaan IDB juga memotivasi banyak negara lain untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Akhirnya pada periode 1970-an dan awal dekade 1980-an, lembaga keuangan syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, dan Turki.

Di Indonesia, pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia Berdiri tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

1.1 Struktur Organisasi IDB

Organisasi IDB terdiri dari Dewan Gubernur (*Board of Governor*), Dewan Direksi Pelaksana (*Board of Executive Directors*), dan Presiden.

Setiap negara anggota diwakili oleh Dewan Gubernur dan Gubernur Alternatif. Setiap anggota negara memiliki lima ratus pokok suara ditambah satu suara yang dihitung untuk setiap saham. Umumnya, keputusan diambil oleh Dewan Gubernur berdasarkan mayoritas hak suara diwakili dalam rapat. Berbeda dengan Dewan Gubernur, Negara Arab Saudi yang tergabung dalam Direktur Eksekutif memiliki bobot 50 % dari total hak suara.

Dewan Gubernur bertemu sekali setiap tahun untuk meninjau kegiatan Bank untuk tahun sebelumnya dan memutuskan kebijakan di masa depan. Dalam pertemuan tahunan Dewan menunjuk seorang Ketua, yang memegang jabatan sampai pemilihan Ketua lain pada pertemuan Dewan berikutnya. Dewan Gubernur adalah badan pembuat kebijakan tertinggi. Hal ini dapat mendelegasikan kekuasaan kepada Dewan Direksi Eksekutif untuk operasi umum Bank. Namun, hanya Dewan Gubernur dapat menangani masalah yang berkaitan dengan keanggotaan, kenaikan atau penurunan modal dasar Bank, otorisasi perjanjian kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan regional, pemilihan Presiden dan Direktur Eksekutif dan memutuskan remunerasi mereka. (Lihat lampiran hal.122)

Adapun biasanya Gubernur diwakili oleh Menteri Keuangan Negara tersebut, sedangkan untuk Gubernur Alternatifnya diwakili oleh Bank Sentral di negara tersebut.

Kemudian, dibawah Dewan Gubernur terdapat *The Board of Executive Directors* (BED) atau yang bisa disebut Badan Direksi Eksekutif. Badan Direksi Eksekutif adalah badan yang bertanggung jawab untuk arah operasi umum dan kebijakan Bank sesuai dengan Anggaran Perjanjian, dan melaksanakan semua kekuasaan didelegasikan kepadanya oleh Dewan Gubernur.

Dalam jangka saat ini, BED ini terdiri dari delapan belas anggota: Sembilan Direktur Eksekutif ditunjuk oleh negara-negara mereka, yang merupakan pemegang saham utama, sementara sembilan lainnya dipilih oleh Gubernur negara-negara lain. Masa jabatan di BED adalah periode terbarukan tiga tahun.

Kesembilan negara yang menjadi Direktur Eksekutif pemegang saham adalah United Arab Emirates, Qatar, Libya, Saudi Arabia, Iran, Nigeria, Turki, Kuwait, dan Mesir. Khusus dalam hal hak suara, Arab Saudi memiliki 50 % dari hak suara.

Presiden adalah pelaksana utama Bank dan dipilih oleh Dewan Gubernur untuk masa jabatan lima tahun dan dapat diperbaharui. Dia juga sebagai ketua Dewan Direksi Pelaksana. Presiden melaksanakan kegiatan bisnis Bank dibawah arahan Dewan Direksi Pelaksana.

Dalam kegiatan bisnisnya, Presiden dibantu oleh tiga Wakil Presiden. Pada saat ini masa jabatan Wakil Presiden adalah tiga tahun dan dapat diperbaharui. Wakil Presiden menjalankan wewenangnya dan melaksanakan fungsi-fungsinya dalam hal administrasi Bank, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Dewan Direksi Pelaksana.

1.2 Bentuk-Bentuk Pembiayaan IDB

Pembiayaan keuangan IDB berasal dari *Ordinary Capital Resources* (sumber modal biasa) dengan cara pinjaman bebas bunga atau pinjaman lunak, dalam bentuk pembiayaan pinjaman, penjualan angsuran, bantuan teknis, penyertaan modal, bagi hasil, istisna'a dan jalur pembiayaan yang diperpanjang untuk *National Development Finance Institutions* (NDFIs). (Islamic Development Bank, <http://www.idb-fourinone.info/download/PedomanPencairanIsDB.pdf>, dikutip pada 18 Februari 2017)

- Pinjaman (*Loan*)

Pembiayaan dalam bentuk pinjaman digunakan untuk proyek-proyek yang diharapkan memiliki dampak pembangunan sosio-ekonomi yang signifikan. Proyek ini dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Pinjaman yang diberikan pun memiliki masa tenggang 3-7 tahun dengan lama pembayaran 15-25 tahun.

- Sewa (*Leasing*)

Sewa merupakan pembiayaan jangka menengah untuk sewa modal peralatan dan aset tetap lainnya seperti pabrik, mesin, dan peralatan untuk industri, agro-industri, infrastruktur, transportasi, dll, baik untuk sector

publik maupun sector swasta. Pada akhir masa sewa, IDB mengalihkan kepemilikan peralatan kepada penyewa sebagai hadiah.

- **Penjualan Instalasi Peralatan (*Instalment Sale*)**

Penjualan Instalasi Peralatan mirip dengan leasing, bedanya adalah bahwa di instalment sale, kepemilikan aset tersebut ditransfer ke penerima pengirim. IDB membeli aset yaitu peralatan dan mesin lalu menjualnya kepada penerima pada nilai yang disepakati termasuk nilai mark-up.

- **Partisipasi Setara (*Equity Participation*)**

IDB berpartisipasi dalam modal perusahaan yang sudah lama berdiri atau baru didirikan yang beroperasi sesuai dengan syariah di sektor publik dan swasta. Partisipasi IDB sebesar satu-pertiga modal perusahaan.

- **Bagi Keuntungan (*Profit Sharing*)**

Bagi keuntungan merupakan kemitraan dua pihak atau lebih yang mengumpulkan modal bersama untuk membiayai usaha. Para mitra berbagi keuntungan atau kerugian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka.

- ***Istina'a***

Istina'a adalah modus yang digunakan untuk promosi perdagangan barang modal, peningkatan kapasitas produksi dan pembiayaan proyek. Istina'a merupakan kontrak untuk barang-barang manufaktur atau aset lainnya di mana produsen setuju untuk menyediakan pembeli dengan

barang-barang yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi dalam waktu tertentu dan untuk setiap harga yang disepakati. IDB membiayai modal kerja dan dengan demikian memberikan kontribusi pada peningkatan kapasitas produksi di negara-negara anggota.

- **Bantuan Teknis (*Technical Assistance*)**

IDB memberikan bantuan teknis dalam bentuk hibah dan atau pinjaman untuk tugas-tugas yang terkait dengan proyek seperti studi kelayakan dan desain, pengawasan pelaksanaan dan untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat penasehat seperti definisi kebijakan, perencanaan sektoral, pembangunan lembaga, penelitian, dll. Bantuan teknis terutama diperluas ke negara-negara anggota paling maju (LDMCs)

- ***Line of Financing to National Development Financing Institutions***

IDB memperluas pembiayaan melalui ekuitas, leasing dan penjualan angsuran ke NDFIs di negara-negara anggota untuk mempromosikan pertumbuhan industry kecil dan menengah (SMEIS) terutama di sektor swasta.

1.3 Syarat-syarat pinjaman dari IDB

Untuk dapat meminjam dana ke IDB, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Dikutip dari *Modes of Finance*, berikut syaratnya:

- IDB biaya biaya layanan untuk menutupi biaya administrasi. Hal ini berkisar dari minimal 0,75% hingga maksimum 2,00% per tahun (OCR: 1,75% - ISFD: 2.00%) dari jumlah pokok.
- Semua jumlah pinjaman yang akan dibayar kembali dalam angsuran tengah tahunan, sama dan berturut-turut di seluruh masa jabatan pembayaran.
- Biaya layanan dibebankan biaya untuk pembayaran segera setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman, hingga maksimum 4% dari biaya total layanan sampai pencairan pertama.
- Permintaan untuk pencairan pertama diperlukan untuk diserahkan dalam waktu enam bulan dari tanggal efektivitas, gagal mana proyek bertanggung jawab untuk pembatalan.
- Berdasarkan tanggal terakhir dari pencairan, jika ada bagian dari Jumlah Pinjaman tidak dimanfaatkan, IDB dapat membatalkan bagian.
- Peminjam menanggung semua pajak, biaya, iuran dan biaya-overruns terkait dengan pinjaman.
- Tergantung pada jenis proyek, Perjanjian dapat memberikan untuk membuka Rekening Khusus di negara Peminjam sesuai dengan Pedoman Pembukaan Rekening Khusus disediakan oleh IDB.
- ketentuan Anti-korupsi dan anti-penipuan termasuk dalam semua dokumen hukum. Untuk memastikan kepatuhan, IDB memiliki hak untuk mengaudit

dan memeriksa catatan dan rekening dari semua pihak yang terkait untuk proyek.

1.4 Mekanisme Peminjaman dari IDB

Langkah-langkah untuk mendapatkan pinjaman IDB dengan cara :

1. Persetujuan: Menyusul permintaan resmi dari Peminjam, IDB memproses permintaan tersebut dan menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Peminjam.
2. Tanda tangan: IDB dan Peminjam menandatangani Perjanjian Kredit.
3. Efektivitas: Peminjam menyediakan dokumen efektivitas ke IDB yang mengkaji dokumen dan menyatakan efektivitas. pelaksanaan proyek dimulai.
4. Pengadaan: The Peminjam menandatangani kontrak dengan pemasok untuk pengadaan barang /jasa.
5. Pencairan: Peminjam meminta IDB untuk pencairan. IDB Salurkan ke pemasok langsung.
6. Jadwal Pembayaran: Pada akhir periode Rahmat, 'Akhir jadwal pembayaran' dikonfirmasi antara IDB dan Peminjam.
7. Pembayaran: Peminjam memulai pembayaran kembali pinjaman untuk IDB - "Pokok Pinjaman +Biaya jasa"

8. Peminjam melengkapi pembayaran kembali pinjaman.

Untuk alurnya antara pihak peminjam dan pihak yang dipinjam, saling menandatangani perjanjian kredit. Kemudian, peminjam melakukan rencana proyek/pengadaan dengan jangka waktu dan hasil yang telah disepakati sebelumnya. Secara berkala, IDB mencairkan pinjaman tersebut kepada kontraktor pengembangan proyek. Terakhir, kontraktor memberikan laporan hasil perkembangan pembangunan kepada peminjam. Setelah jadi, peminjam harus Melunasi jumlah pinjaman pokok yang juga ditambah biaya layanan administrasi.

Terdapat berbagai pertimbangan IDB untuk memberikan sejumlah pinjaman kepada suatu negara.

“Like other development banks, the level of IDB financing in a member country depends on the Bank's available funds, the willingness of member countries to benefit from the IDB's available financing facilities, the availability of sound bankable projects, the speed of implementation of the projects already approved the absorptive capacity of the country, as well as the population and income per capita of the country. A major constraint in obtaining Bank's financing is repayment of debt on due dates. Overdues may delay disbursements for existing projects and approval of new projects. Also countries committed to implementation of Structural Adjustment Programmes may have some difficulties in absorbing non-concessional financing from the IDB.”

Seperti yang dikatakan diatas, IDB mempertimbangkan jumlah dana yang akan dipinjam oleh negara peminjam. Pertimbangan IDB tersebut berdasarkan kondisi negara, seperti :

- a. Ke-ikut sertaan modal Negara Peminjam dalam IDB
- b. Kemauan negara peminjam untuk mengikuti program IDB
- c. Kesesuaian antara target dan implementasi proyek
- d. Jumlah populasi dan keadaan APBN
- e. Kemampuan untuk melunasi hutang pokok dan bunga hutang pada tepat waktu.

3.5 Komitmen IDB dalam Pencapaian Pembangunan

Komitmen IDB untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota ini terlihat dari pertumbuhan persetujuan *Ordinary Capital Resources* (IDB-OCR) net lebih 1396H-1435H di 12,2 persen rata-rata. Antara 1396H dan 1435H, IDB Grup disetujui 7.613 proyek dan operasi sebesar ID70.1 miliar (\$ 101.700.000.000). Infrastruktur menerima bagian terbesar dari IDB-OCR pada 77 persen atau ID22.2 miliar (\$ 32700000000), diikuti oleh sektor pertanian 11 persen, pendidikan 8 persen, dan kesehatan 3,5 persen.

Dari persetujuan Grup kumulatif, pangsa IDB-OCR adalah 41,8 persen, 23,1 persen ITFC, dan ICD 2,7 persen. Lainnya termasuk pembiayaan perdagangan pre-ITFC menyumbang 29,1 persen, *Unit*

Investment Fund (UIF) 2,2 persen, Awqaf Properti Investasi Dana (APIF) 0,4 persen dan operasi Bantuan Khusus 0,7 persen. (ISDB, <http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/English/IDB/CM/Publications/41%20Years%20in%20the%20Service%20of%20Development.pdf>, diakses pada 29 Januari 2017)

Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melayani negara-negara anggota, IDBG telah mengembangkan lima pilar, yakni : pembangunan sosial, Pembinaan pembangunan Islamic Finance, pengembangan Sektor Swasta, pembangunan Infrastruktur, Kerjasama Ekonomi Meningkatkan dan pengembangan Kapasitas.

1. Pengembangan Pembangunan Sosial

Sosial selalu berada di inti dari misi IDB. Inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dijalankan melalui banyak kegiatan Grup. Untuk memenuhi misinya, IDB berfokus pada pembangunan sosial terutama mempromosikan pendidikan dan kesehatan. Bank juga meluncurkan sejumlah dana dengan tujuan mengatasi kemiskinan dan mempromosikan solidaritas.

1.1. Pendidikan

Bank berusaha untuk mencapai alokasi sumber daya yang efisien dan dialog kebijakan yang efektif dengan negara-negara anggota. Untuk tujuan ini, bank telah mengembangkan Pendidikan baru Kebijakan Sektor (ESP) di 1435H dengan tema "meningkatkan

pembelajaran bagi martabat manusia". Kebijakan tersebut mengidentifikasi tiga bidang strategis untuk intervensi Bank akan kemajun negara: pendidikan universal inklusif berfokus pada pendidikan bilingual, pengembangan keterampilan, dan pendidikan tinggi.

1.2. **Kesehatan**

Investasi Bank di sektor kesehatan tetap fokus pada tiga bidang tematik utama: (i) pencegahan dan kontrol dari kedua penyakit menular dan tidak menular; (ii) sistem kesehatan penguatan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan (iii) pembiayaan kesehatan alternatif untuk menghapus, sejauh mungkin, hambatan keuangan untuk mengakses, menghasilkan / memobilisasi sumber daya keuangan tambahan untuk kesehatan, dan membuat lebih baik menggunakan sumber daya yang tersedia.

1.3. **Program Solidaritas Islam**

Dana Solidaritas untuk Pembangunan (ISFD): Dana ini didirikan sebagai wafaq (infaq). Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara anggota IDB dengan berfokus pada mendukung pertumbuhan pro-poor, pembangunan manusia (terutama perbaikan dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan), dan meningkatkan kapasitas produktif dan sarana

berkelanjutan pendapatan bagi masyarakat miskin. Dana tersebut disalurkan kepada negara-negara anggota yang kurang berkembang.

Wakaf Properti Dana Investasi (APIF): organisasi wakaf, sebagai entitas amal Islam yang melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya segudang. Dalam rangka untuk mengatasi kebutuhan pengembangan sektor Awqaf, IDB mendirikan Awqaf Properti Investasi Dana (APIF) pada tahun 2001 dan bertindak sebagai mudharib untuk Dana. Tujuan dari APIF adalah untuk mengembangkan lahan Wakaf menganggur dan merenovasi bangunan Wakaf yang ada, sehingga mengubah mereka menjadi aset yang menghasilkan pendapatan. Pendapatan yang dihasilkan dari proyek-proyek APIF digunakan oleh Wakaf dan dengan amal organisasi untuk membiayai dan mendukung kegiatan mereka di bidang sosial dan amal yang mendukung kaum miskin, serta di bidang agama dan budaya.

Dunia Wakaf Foundation (WWF): Yayasan ini yang terbentuk pada tahun 1422H (2001) telah mengabdikan kegiatannya di 1435H untuk empat proyek-proyek besar, yakni: International Wakaf Penasehat Rumah (IWAH), *Awqaf Capital* (ACAP), India Pendidikan Wakaf, dan Wakaf untuk Pembangun

Tujuan IWAH adalah untuk meningkatkan kesadaran dan menghidupkan kembali budaya Wakaf; menyatukan Institusi dan

pasar Awqaf kegiatan mereka; mengorganisir konferensi internasional; dan pilot proyek penelitian utama (*Awqaf Databank*, *Awqaf Legislasi*, *Hukum Model*, dll)an (W4D). Sedangkan ACAP, tujuannya adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan dermawan individu, lembaga filantropi publik dan swasta, untuk lembaga keuangan kelas dunia yang mengkhususkan diri dalam *Cash Waqf Asset Management* di untuk memberikan kualitas tinggi layanan investasi syariah compliant dan mengatasi kebutuhan spesifik dari Sektor Wakaf. Untuk India Pendidikan Waqf, didirikan untuk mendukung pelatihan dan kegiatan pendidikan dari masyarakat Muslim di India. Adapun Wakaf untuk Proyek Pembangunan (W4D), tujuannya adalah untuk menyuntikkan prinsip Waqf - tidak kembali - ke bawah piramida (yaitu investasi aset Wakaf ke proyek-proyek yang bertanggung jawab sosial / melakukan bisnis dengan orang miskin).

2. **Membina Pembangunan Islamic Finance**

Sebagai lembaga terkemuka dalam membina pengembangan keuangan Islam, Bank telah terlibat dalam banyak inisiatif, termasuk pengembangan diperlukan lingkungan yang kondusif bagi keuangan Islam, mendirikan dan mendukung lembaga-lembaga keuangan Islam, pengembangan sektor keuangan mikro Islam dari perspektif sektor keuangan dan meningkatkan kesadaran tentang keuangan Islam melalui

organisasi dan partisipasi dalam berbagai acara. Selain itu, Bank juga bekerja untuk pengembangan sektor Awqaf untuk tujuan amal.

2.1 Penelitian Islam dan Lembaga Pelatihan (IRTI)

IRTI didirikan pada 1401H (1981), melakukan kegiatan penelitian, pelatihan, konsultasi dan penyebaran pengetahuan yang bertujuan untuk membawa jasa keuangan di negara-negara anggota sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. IRTI juga melakukan berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan di bidang keuangan Islam, seperti Hadiah IDB untuk Ekonomi Islam, Perbankan dan Keuangan; IRTI Beasiswa dan Hibah Penelitian Program; serta pengumpulan dan publikasi data lembaga keuangan Islam. IRTI juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya secara global, termasuk perguruan tinggi dan pihak berwenang, terhadap kemajuan pengetahuan di bidang keuangan Islam melalui dialog kebijakan, lokakarya, seminar, ceramah, dll .

2.2 Program Dukungan Teknis

Dalam Program ini, Bank memberikan bantuan teknis untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk pengembangan keuangan Islam. Bantuan teknis tersebut seperti memfasilitasi dalam mengembangkan undang-undang, peraturan, mekanisme tata kelola Syariah, dan kerangka pengawasan untuk bank syariah, Sukuk dan Takaful. Selain itu, bantuan teknis juga berguna dalam menciptakan

strategi tingkat tinggi untuk pembangunan sektor keuangan Islam di negara-negara penerima bantuan.

2.3 Pengembangan Arsitektur Keuangan Syariah

Bank ini mendukung dan memberikan kontribusi untuk perkembangan arsitektur keuangan Islam. Dalam hal ini, ia mendirikan dan terus membantu Lembaga Islam Infrastruktur (IIs) - seperti AAOIFI, CIBAFI, IFSB, IICRA, IIFM, dan IIRA - dengan berbagai cara, termasuk memberikan bantuan teknis, pembiayaan pengembangan dan penerapan standar dan dokumentasi, berpartisipasi dalam pertemuan Dewan, Dewan, dan Komite Teknis mereka, dan dalam kegiatan dan acara lainnya.

2.4 IDB Program Pengembangan Keuangan Mikro (IDB-MDP)

Dalam program ini, Bank terlibat dalam berbagai kegiatan untuk meningkatkan inklusi keuangan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi memberikan bantuan teknis untuk mengembangkan sektor keuangan mikro syariah, membantu dalam membangun atau memperkuat lembaga keuangan mikro syariah dengan cara penyertaan modal dan mengembangkan peraturan untuk meningkatkan lingkungan yang kondusif bagi keuangan mikro syariah.

2.5 IDB Prize di Ekonomi Islam & Perbankan dan Keuangan

Islam

Didirikan sejak 1408H (1988), IDB Prize ini telah diberikan kepada 31 ulama (ahli hukum, ekonomi, dan bankir) dan 4 lembaga (pusat penelitian atau lembaga keuangan) dari berbagai belahan dunia.

2.6 Keuangan Kesadaran Islam Enhancement

IDB meningkatkan kesadaran keuangan Islam dan juga mempromosikan organisasi dan / atau partisipasi dalam seminar dan forum berbagai event internasional.

2.7 Kerjasama, Aliansi dan Kemitraan

IDB menempa kemitraan yang kuat dengan berbagai lembaga multilateral, bilateral dan donor untuk mengeksplorasi kegiatan bersama, yang akan membantu mengembangkan sektor keuangan Islam. Untuk tujuan ini, secara aktif melaksanakan Memorandum of Understanding yang ditandatangani dengan BCEAO, Bank Dunia, COMCEC, AGFUND dan GIZ.

2.8 Produk Keuangan Pusat Pengembangan (FPDC)

Bank mendirikan FPDC untuk meningkatkan kepemimpinan Grup IDB dalam pengembangan dan promosi produk keuangan Islam yang inovatif dalam rangka Maqasid al-Syari'ah. Dalam 1435H, Pusat terlibat dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Meluncurkan 'IDB Mode Keuangan' publikasi, manual produk dari produk keuangan yang ditawarkan oleh IDB untuk klien. Publikasi ini tersedia di situs publik.
- Diselenggarakan lokakarya dengan IDB Operasi Complex untuk mengidentifikasi masalah di dalam produk keuangan yang ada dan mengejar ide-ide baru untuk inovasi dalam hal ini. Rencana Aksi kini sedang dipersiapkan untuk masalah.
- Membantu dalam pengembangan strategi baru dan produk untuk memanfaatkan dana dari Dana Islamic Solidaritas untuk Pembangunan (ISFD).
- Mekanisme kemitraan dieksplorasi untuk mobilisasi sumber daya oleh IDBG dan selera investor untuk Tahun same.1341 di Dinas Pembangunan
- Dikembangkan seperangkat alternatif untuk 'Instrumen Pembiayaan Real Tawarruq. Produk ini sekarang menjalani sidang dengan lembaga keuangan di GCC serta kawasan MENA.
- Dikembangkan produk untuk melaksanakan LC-Konfirmasi untuk ITFC. IDB Grup Komite Syariah menyetujui produk. prosedur produk dan dokumentasi sedang dalam pengembangan.
- Ditugaskan laporan teknis oleh konsultan pada Indeks OKI-COMCEC S & P. Laporan ini berfungsi sebagai alat penilaian

yang kaya untuk risiko dan portofolio manajer di seluruh dunia. Laporan tersebut telah diterima untuk publikasi di Bursa Istanbul Ulasan.

- Berpartisipasi dalam lebih dari 30 konferensi dan simposium di seluruh dunia, dengan topik mulai dari masa depan derivatif di Islamic Finance Positif Banking untuk sesi IASB pada keuangan Islam.
- Melakukan enam program pelatihan dan ceramah untuk membangun kapasitas dan menciptakan kesadaran tentang berbagai aspek Keuangan Islam di seluruh daerah.
- Mendirikan Rekayasa Keuangan Islam (IFE) Lab, yang mulai beroperasi pada Muhammad V University of Maroko. Lab, yang pertama dari jenisnya di OKI Negara Anggota, bertujuan untuk membangun generasi pelopor dalam rekayasa keuangan yang berhasil dalam menerapkan teknik modern untuk melaksanakan tujuan dari ekonomi Islam melalui inovasi keuangan etis.
- Dipelopori dan terstruktur berbagai mekanisme Sukuk, untuk kedua IDBG serta negara-negara anggotanya.

3. **Pembangunan sektor swasta**

Sejak awal, IDB Group telah mendukung pengembangan sektor swasta di negara-negara anggota melalui investasi dan jasa penasehat. Pentingnya sektor swasta sebagai mesin pertumbuhan dan peran kunci

dalam memberantas kemiskinan dan mendorong masyarakat yang inklusif telah menyebabkan pembentukan dari beberapa entitas IDB Grup besar (seperti ICD, ICIEC, ITFC) dan untuk pengembangan berdedikasi program dan inisiatif (seperti PPP dan thiqah).

3.1 Islamic Corporation untuk Asuransi Investasi dan Kredit Ekspor (ICIEC)

ICIEC mulai beroperasi pada bulan Juli 1995 untuk memfasilitasi arus investasi asing langsung di negara-negara anggota dengan memberikan Syariah asuransi dan mitigasi risiko fasilitas compliant. Tujuan dari ICIEC adalah untuk memberikan: (i) asuransi kredit ekspor dan reasuransi untuk menutupi non-pembayaran piutang ekspor yang dihasilkan dari komersial (pembeli) atau non-komersial (negara) risiko dan (ii) asuransi investasi dan reasuransi terhadap risiko negara, terutama risiko pembatasan pengalihan pertukaran, pengambilalihan, perang dan kerusuhan dan pelanggaran kontrak.

3.2 Islamic Corporation untuk Pengembangan Sektor Swasta (ICD)

ICD ini memfokuskan pada sektor swasta di dunia Islam. Misi ICD adalah untuk peran yang dimainkan oleh IDB dengan mengembangkan dan mempromosikan sektor swasta sebagai kendaraan untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. ICD

berfokus terutama pada mengidentifikasi peluang di sektor swasta, menyediakan berbagai macam syariah produk dan jasa keuangan yang kompatibel, dan memperluas akses ke pasar modal syariah.

3.3 Perusahaan Penjualan Keuangan Internasional (ITFC)

ITFC didirikan pada tahun 2005 dengan misi untuk mengkonsolidasikan bisnis *trade finance* yang sebelumnya dilakukan oleh berbagai jendela dalam Grup IDB. Untuk memenuhi tujuannya, ITFC terlibat dalam kegiatan-kegiatan berikut (a) pembiayaan perdagangan, sendiri atau bekerja sama dengan sumber keuangan; (B) mendorong dan memfasilitasi intra-trade dan perdagangan internasional dari negara-negara anggota; (C) membantu negara-negara anggota untuk memiliki akses ke dana dalam dan luar negeri, serta akses ke pasar keuangan untuk tujuan perdagangan pembiayaan; (D) membantu dalam pengembangan peluang investasi; (E) mengembangkan dan diversifikasi instrumen keuangan dan produk untuk pembiayaan perdagangan; (F) memberikan bantuan teknis dan pelatihan untuk bank dan lembaga-lembaga swasta dan publik yang terlibat dalam pembiayaan perdagangan di negara-negara anggota OKI; (G) melakukan kegiatan lain atau fungsi yang mungkin relevan atau kondusif untuk pencapaian tujuannya.

3.4 Public-Private Partnership

IDB berpartisipasi dalam kemitraan publik-swasta ("PPP") sebagai sarana merangsang pertumbuhan sektor swasta. PPP diperkenalkan pada tahun 2006 (1426-1427H) sebagai model pembiayaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di negara-negara anggota. Sejak itu, PPP telah menyumbang hampir seperempat dari semua pembiayaan infrastruktur IDB, dengan total investasi mencapai \$ 3,5 miliar. prestasi PPP dengan mitra co-financing seperti IFC dan ADB, selama 2009-2014 (1430-1435H) meliputi (i) instalasi baru 1.730 MW dari kapasitas pembangkit listrik, (ii) pembangunan kapasitas penyulingan dari 400.000 barel per hari (Saudi Arabia), (iii) pengembangan pabrik pupuk dengan kapasitas produksi 3.295.000 ton per tahun, (iv) pemasangan kapasitas produksi 0.576.000 ton aluminium per tahun (UEA) dan (v) pengembangan bandara baru untuk memenuhi 3 juta penumpang per tahun.

3.5 Kelompok Forum Bisnis (Thiqah)

Thiqah adalah platform bisnis terkemuka dari Grup IDB melayani sektor swasta di negara-negara anggota. Melalui peran fasilitasi dan katalis, thiqah bertujuan: peluang investasi (i) Menjamin investasi dan kredit ekspor serta faktor keberhasilan lainnya, semua melalui satu platform dari Grup IDB (ii) Menjamin faktor yang diperlukan untuk investasi yang sukses,

(iii) Memberikan , (iv) Pemantauan iklim investasi di negara-negara anggota, (v) Bangunan dan berbagi pengusaha / pengusaha database yang mencakup semua negara anggota, dan (vi) Mentransfer model yang sukses dan praktek terbaik dalam proyek-proyek investasi di antara negara-negara anggota.

4. **Infrastruktur pengembangan**

Pembangunan Infrastruktur secara tradisional menjadi kekuatan kunci dari IDB Group. Hampir 80 persen dari permintaan untuk pembiayaan IDB dari negara-negara anggota dalam sektor infrastruktur - energi, air, transportasi dan telekomunikasi .Hal ini mencerminkan kesenjangan yang signifikan pembiayaan infrastruktur yang ada di negara-negara anggota dan realisasi peningkatan pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kehidupan masyarakat.

4.1 Energi

Akses ke energi yang dapat diandalkan dan terjangkau adalah kebutuhan dasar untuk modernisasi, industrialisasi dan pengurangan kemiskinan. Sejak awal tahun 1396H, IDB telah dibiayai lebih dari US \$ 32800000000, senilai proyek energi di negara-negara anggotanya. Dalam 1435H, Bank menyetujui 16 proyek energi (termasuk dua menggunakan PPP modalitas) sebesar ID1.2 miliar (\$ 1900000000) untuk sepuluh negara

anggota - Bangladesh, Burkina Faso, Benin, Kamerun, Mesir, Pakistan, Senegal, Maroko, Mauritania, dan Uganda.

4.2 sektor Transportasi

Transportasi, sebagai katalis yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dipercepat dan pembangunan ekonomi, terus tetap salah satu prioritas tertinggi dari negara-negara anggota IDB. proyek-proyek sektor transportasi disetujui oleh Bank secara efektif memberikan kontribusi bagi kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial dari negara-negara anggota dan memainkan peran strategis dalam pembukaan negara perifer, terisolasi dan terkurung daratan dan wilayah. IDB juga telah bergabung dengan pengembangan bankcommunity multilateral (sejak Rio + 20 di 2012) dalam meningkatkan komitmennya untuk mengangkat keberlanjutan dengan memastikan bahwa infrastruktur itstransport projectsare aman, lebih efisien, dan ekonomis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

4.3 Pembangunan Perkotaan

Migrasi dari desa ke kota di negara-negara anggota yang menyamar meningkat tantangan perkembangan kejenuhan infrastruktur perkotaan, khususnya penyediaan air, sanitasi, pengelolaan sampah, dan perumahan sosial. Transformasi demografis ini membutuhkan mengamankan infrastruktur

perkotaan yang sesuai dan terjangkau dengan cara yang efisien dan tepat waktu. Indikator pembangunan utama untuk komitmen saat ini meliputi: (i) penyediaan kapasitas pengolahan air minum agregat 640,000m³/day, (ii) menghubungkan 1 juta rumah tangga baru untuk pasokan air minum, (iii) menyediakan kapasitas pengolahan air limbah agregat 680,000m³/day , (iv) menghubungkan 1,15 juta rumah tangga baru untuk jaringan layanan air limbah, (v) penyediaan empat juta orang dengan akses ke layanan pengumpulan limbah padat, dan (vi) menyediakan perumahan yang terjangkau untuk empat puluh ribu keluarga.

5. **Kerjasama Ekonomi**

Kerjasama ekonomi diantara negara-negara anggota yang berupa mempromosikan kerja sama antara negara-negara anggota berakar dalam misi IDB. Penguatan hubungan ekonomi melalui peningkatan perdagangan intra-OKI, mempromosikan investasi asing langsung dan daya saing, dan bentuk-bentuk kerjasama antara MC merupakan inti dari mandat IDBG ini.

5.1 Promosi Perdagangan dan Program Kerjasama (TCPP)

Program ini dikelola oleh ITFC dan memfokuskan kegiatannya pada fasilitasi perdagangan dan kerja sama di antara negara-negara anggota OKI.

5.2 Promosi Investasi Teknis Program Bantuan (ITAP)

Program ini bertujuan untuk membangun kapasitas lembaga promosi investasi (IPAS) dari negara-negara anggota dan meningkatkan iklim investasi mereka serta dalam mengidentifikasi dan mempromosikan peluang investasi yang menjanjikan.

5.3 IDB WTO terkait Program

Tujuan dari program ini adalah untuk membantu negara-negara anggota OKI dalam memahami perjanjian WTO dan mengatasi implikasi kebijakan mereka.

5.4 Program Kerjasama Teknik (TCP)

Program ini merupakan kerjasama yang mendukung transfer dan pertukaran keterampilan, pengetahuan dan pengalaman antara negara-negara anggota. Program ini melibatkan donor teknis, penerima manfaat, dan IDB sebagai fasilitator. Kegiatannya mencakup organisasi seminar, on-the-job pelatihan, dan rekrutmen tenaga ahli untuk tujuan pengembangan kapasitas, dan menambah keterampilan dan memperkaya pengalaman staf teknis dan profesional.

5.5 Reverse Linkage inisiatif Reverse Linkage (RL)

Program Bank ini merupakan kerjasama dimana negara-negara anggota setuju untuk bertukar keahlian, pengetahuan dan

teknologi dengan Bank melayani sebagai konektor dan katalis. inisiatif mempromosikan solidaritas dan kemitraan di antara negara-negara anggota IDB dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan yang berbeda.

3.6 Kerjasama Indonesia – IDB

Negara Indonesia merupakan salah satu negara pendiri Islamic Development Bank. Kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan IDB telah dilakukan sejak tahun 1978 / 1398 H. Sharing Indonesia terhadap total modal IDB sebesar 2,32 persen. Porsi ini menempatkan Indonesia dalam 10 besar negara penyeter modal IDB. Saat ini Indonesia menjadi salah satu anggota *Board Executive Director* (BED) di IDB.

Kerjasama untuk pembangunan tahun 2016-2020 dimulai saat konferensi pers Laporan Tahunan IDB 2015 di Jakarta, Senin 16 Mei 2016. Pada forum ini disepakati akan ditandatangani *Member Country Partnership Strategy* (MCPS). Kerangka acuan yang menjadi referensi utama dalam hubungan kerjasama dan keterlibatan IDB Group di Indonesia saat ini adalah dokumen *Member Country Partnership Strategy* (MCPS) Indonesia 2011-2014. MCPS disusun dan disahkan bersama antara IDB dan Pemerintah Republik Indonesia.

Dengan cakupan isi MCPS antara lain :

- komitmen financing IDB baik untuk sektor pemerintah maupun sektor swasta,
- bantuan teknis dalam bentuk hibah, fungsi advisory, promosi investasi dan fungsi fasilitasi oleh IDB Group.

MCPS menggaris bawahi pilar penting kerjasama IDB dengan Indonesia yaitu:

- o Islamic finance,
- o Partnership,
- o Capacity development, dan Reverse linkage

Indonesia selalu aktif berperan dalam aktivitas IDB, baik dalam hal memberikan dukungan moral, finansial, maupun yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia.

Dukungan moral, antara lain terhadap masuknya beberapa negara menjadi anggota baru IDB, bantuan pendanaan pada negara Palestina, dan negara anggota lain khususnya di kawasan Afrika yang mengalami bencana alam, serta bantuan pembangunan.

Dukungan finansial, antara lain kontribusi Indonesia ke dalam modal IDB (*ordinary capital resources*), kontribusi Indonesia ke dalam modal Export Financing Scheme (EFS)-IDB, dan penyertaan Indonesia

ke dalam modal *The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit* (ICIIEC).

Dukungan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari adanya dukungan terhadap penempatan *national agency* di Indonesia yang dibutuhkan oleh IDB sebagai *channeling, line atau executing agent* IDB di Indonesia. Tujuan penempatan *national agency* tersebut adalah untuk memperlancar operasional IDB dalam hubungan bilateral, korespondensi, komunikasi, pertukaran data dan informasi, pencairan dana dan pembayaran kembali. unan daerah Mindanau, Filipina selatan. (Maskur,Fathkul,2017)

3.7 Bantuan IDB untuk Indonesia

Islamic Development Bank (IDB) dengan pemerintah Indonesia telah menjalankan proyek-proyek dalam bidang pendidikan tinggi, pembangunan perkotaan dan energi guna meningkatkan pembangunan negara. Proyek tersebut bertujuan untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Program-program yang diluncurkan IDB lebih memusatkan perhatian pada bidang pembangunan generasi muda dan infrastruktur, serta kerangka pembangunan strategis 10 tahun. IDB juga berkomitmen terus mempromosikan penerapan keuangan syariah pada setiap program yang dilakukan. (Wahyu,Donang,

<http://katadata.co.id/berita/2016/05/19/idb-beri-utang-14-negara-rp-21-triliun-separuhnya-ke-indonesia>, akses 7 Januari 2017)

IDB memberikan Indonesia bantuan pinjaman dana sebanyak 11,59 triliun. Perjanjian pemberian pinjaman itu dilakukan bersamaan sidang tahunan ke-41 IDB di Jakarta pada Kamis, 19 Mei 2016. Dana ini rencananya digunakan untuk menjalankan proyek-proyek dibidang pendidikan tinggi, pembangunan perkotaan dan energi. Untuk program penataan kawasan kumuh sebesar US\$364,44 juta (Rp 4,84 trilion), program pengembangan empat perguruan tinggi Islam sebesar US\$176,5 juta (Rp 2,34 triliun), dan perluasan jaringan listrik atau transmisi sebesar US\$330 juta (Rp 4,39 triliun). (Budiawati, Arie Dwi, <http://www.dream.co.id/dinar/idb-siap-kucurkan-dana-sebesar-us87094-juta-untuk-indonesia-160516s.html>, akses 7 Janari 2017).

Pada bidang pendidikan, bantuan ini dikhususkan untuk membangun empat lembaga pendidikan tinggi guna meningkatkan lingkungan belajar, kualitas, relevansi, dan daya saing empat lembaga pendidikan tinggi melalui perluasan, melengkapi fasilitas yang sudah ada dan fasilitas baru, pengembangan kurikulum dan staf, memperkuat kapasitas riset, dan mendorong komersialisasi inovasi.

Penerima manfaat proyek ini meliputi empat universitas di Indonesia, yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Universitas Negeri Malang dan Universitas Jember di Jawa Timur, serta

Universitas Mulawarman di Kalimantan Timur. Dukungan tersebut akan meliputi pembangunan 30 gedung baru, serta penyediaan infrastruktur dan peralatan pendukungnya. Pengembangan kurikulum dan akreditasi program akademik, program pelatihan untuk pengembangan staf, hibah penelitian dan pengajaran serta penyusunan konsorsium penelitian juga merupakan komponen kunci dalam proyek ini. Strategi yang diterapkan adalah mengembangkan universitas penerima manfaat sebagai Pusat Keunggulan (Center of Excellence) dalam bidang bioteknologi pertanian dan kesehatan, inovasi pembelajaran, studi tropis, dan ketahanan pangan.

Dalam bidang pembangunan perkotaan, diadakan Proyek Penganganan Permukiman Kumuh Nasional. Dalam proyek ini, IDB memberikan dukungan finansial senilai 329,76 juta Dolar AS. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perkotaan melalui perbaikan dan pencegahan permukiman kumuh, dengan melaksanakan pembangunan berbasis masyarakat dan partisipasi pemerintah setempat.

Dalam agenda Program Penanganan Pemukiman Kumuh Nasional (NSUP), proyek ini diimplementasikan menjadi program nasional Pemerintah Indonesia dengan gerakan KOta TAnpa KUmuh (KOTAKU). Program ini dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip untuk memberdayakan masyarakat dan untuk memperkuat peran pemerintah setempat untuk percepatan gerakan '100-0-100' (100%

tersedia pasokan air, 0% Permukiman Kumuh, dan 100% akses fasilitas Sanitasi) untuk mengurangi dan mencegah permukiman kumuh di perkotaan dan peri-urban melalui peningkatan infrastruktur dan mata pencaharian yang berkelanjutan.

Menurut Direktur Pembangunan Perumahan di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Ir. Rina Farida mengatakan, “Proyek tersebut akan dilaksanakan di 15 provinsi di Jawa bagian Barat, Sumatra, dan Kalimantan, meliputi 9243 Kelurahan di 116 kota/kabupaten. Proyek tersebut secara khusus akan meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur yang baik agar dapat mengurangi permukiman kumuh berdasarkan 7+1 indikator permukiman kumuh, mendorong kerja sama yang lebih baik antara para pemangku kepentingan melalui pemberdayaan pemerintah setempat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggalakkan mata pencaharian yang berkelanjutan

Pada program pembangunan energi, dilakukan proyek perluasan jaringan listrik. untuk mendukung perluasan jaringan listrik sehubungan dengan kapasitas pembangkit listrik 35.000 MW, IDB akan menyediakan pembiayaan sebesar 330 juta Dolar AS untuk proyek senilai 965 juta Dolar AS.

Tujuan utama proyek tersebut adalah untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur transmisi listrik di Jawa-Bali, Sumatra,

Kalimantan dan Sulawesi untuk menyediakan pasokan tambahan kapasitas pembangkit listrik yang dapat diandalkan dan efektif yang sedang dikerjakan di area proyek. Setelahnya, untuk meningkatkan kapasitas jaringan transmisi listrik untuk menyediakan pasokan sebesar 332 TWh (pada tahun 2020) dari sebelumnya sebesar 228 TWh (pada tahun 2015), dan meningkatkan tingkat ketersediaan listrik nasional, dari 84% pada saat ini menjadi 97%.